



Perubahan
**RENCANA KERJA
TAHUN 2025**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya.

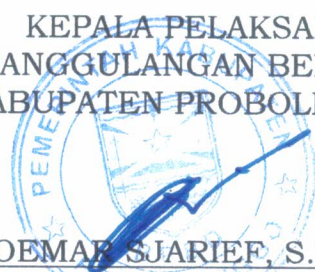
Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan serta mempertimbangkan berbagai keadaan dan analisis kegiatan selama tahun berjalan.

Selanjutnya, Perubahan Renja Tahun 2025 ini diharapkan menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2025 dan dapat mengoptimalkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun anggaran berjalan serta dapat dijadikan pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Demikian Demikian Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 ini disusun. Semoga segala program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Probolinggo, Juli 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



R. OEMAR SJARIEF, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730729 200312 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 9**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan I..... 9

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH..... 17**

BAB IV PENUTUP..... 26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	13
Tabel 3.1	Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025 adalah Rencana Kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi serta menyikapi dampak dari adanya Refocusing Anggaran, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perubahan Renja tahun 2025 ini digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan Sekretariat yang membutuhkan perubahan dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Perubahan Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyusunan Perubahan RKPD. Sehingga penyusunan Perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo;
27. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Probolinggo
28. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kemudahan Akses Dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Probolinggo
29. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;

30. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 18 Seri G;
31. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pronolinggo Tahun 2024;
33. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 adalah sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Probolinggo secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, yaitu :

1. Terwujudnya dokumen Perubahan Renja yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan sampai dengan sisa tahun anggaran;
2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja;

3. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang harus segera diakomodir;
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025;
5. Memberikan arah/acuan dalam penyusunan Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2025 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang latar belakang Perubahan Renja Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Menggambarkan kajian terhadap hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 s/d TW I (Maret 2025).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 setelah Perubahan Renja untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan hasil rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I telah dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menilai dan memastikan bahwa target dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan prioritas daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/ perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sampai dengan triwulan I tahun 2025 disajikan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dengan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/S ub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 202 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2026 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Ket
							I												
1	2	4	5	8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
				K	SATUAN	Rp	K	SATUAN	Rp	K	SAT	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				5.729.362.042			950.938.128			950.938.128				950.938.128			
	Meningkatnya Pelayanan Kebencanaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.729.362.042			950.938.128			950.938.128		16,60		950.938.128		16,60	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.729.362.042			950.938.128			950.938.128		16,60		950.938.128		16,60	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LHE AKIP PERANGKAT DAERAH			4.146.899.042			806.903.113			806.903.113		19,46		806.903.113		19,46	
			PERSENTASE KENAIKAN NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	5	%			%			%			#DIV/0 !				#DIV/0!	

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dengan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/S ub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 202 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2026 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Ket
							I												
1	2	4	5	8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
				K	SATUAN	Rp	K	SATUAN	Rp	K	SAT	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100	%	24.633.000	0	%	960.000	0	%	960.000		3,90	0	960.000	0	3,90	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokume n	22.890.000	0	dokume n	960.000	0	dokume n	960.000		4,19	0	960.000	0	4,19	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	1.743.000	0	laporan	0	0	laporan	0		0,00	0	0	0	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang Dilaporkan Tepat Waktu	1	dokume n	2.841.049.458	0	dokume n	608.967.059	0	dokume n	608.967.059		21,43	0	608.967.059	0	21,43	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	orang	2.827.365.458	15	orang	607.667.059	15	orang	607.667.059		21,49	15	607.667.059	15	21,49	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	dokume n	13.684.000	0	dokume n	1.300.000	0	dokume n	1.300.000		9,50	0	1.300.000	0	9,50	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	388.712.320	0	%	71.698.600	0	%	71.698.600		18,45	0	71.698.600	0	18,45	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	paket	68.215.100	0	paket	0	0	paket	0		0,00	0	0	0	-	

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dengan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/S ub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 202 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2026 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Ket
							I												
1	2	4	5	8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
				K	SATUAN	Rp	K	SATUAN	Rp	K	SAT	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	2.600.000	0	paket	0	0	paket	0		0,00	0	0	0	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	317.897.220	3	laporan	71.698.600	3	laporan	71.698.600		22,55	3	71.698.600	3	22,55	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12	laporan	541.282.264	0	laporan	109.114.154	0	laporan	109.114.154		20,16	0	109.114.154	0	20,16	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	1.890.000	0	laporan	0	0	laporan	0		0,00	0	0	0	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	161.000.000	3	laporan	31.169.994	3	laporan	31.169.994		19,36	3	31.169.994	3	19,36	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	378.392.264	3	laporan	77.944.160	3	laporan	77.944.160		20,60	3	77.944.160	3	20,60	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	73	unit	351.222.000	8	unit	17.123.300	8	unit	17.123.300		4,88	8	17.123.300	8	4,88	

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dengan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/S ub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2026 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Ket
							I												
1	2	4	5	8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
				K	SATUAN	Rp	K	SATUAN	Rp	K	SAT	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	unit	321.722.000	8	unit	17.123.300	8	unit	17.123.300		5,32	8	17.123.300	8	5,32	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit	29.500.000	0	unit	0	0	unit	0		0,00	0	0	0	-	
2	Meningkatnya Pelayanan Kebencanaan Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100	%	1.582.463.000	0	%	144.035.015	0	%	144.035.015		9,10	0	144.035.015	0	9,10	BP BD
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	%	84.531.500	0	%	-	0	%	-		0,00	0	-	0	-	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	45000	orang	84.531.500	0	orang	0	0	orang	0		0,00	0	0	0	-	

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2026 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Ket
							I												
1	2	4	5	8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
				K	SATUAN	Rp	K	SATUAN	Rp	K	SAT	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Capaian Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	%	676.403.000		%	-		%	-		0,00		-		-	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	dokumen	121.403.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-		0,00	0	-	0	-	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1	kawasan	555.000.000	0	kawasan	0	0	kawasan	0		0,00	0	0	0	-	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Capaian Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi	100	%	753.032.500	0	%	144.035.015	0	%	144.035.015		19,13	0	144.035.015	0	19,13	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50.000	orang	700.000.000	11.300	orang	144.035.015	11.300	orang	144.035.015		20,58	11.300	144.035.015	11.300	20,58	

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dengan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/S ub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 202 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2026 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 (%)		Ket
							I												
1	2	4	5	8			9			13 = 9+10+11+12			14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100%		17
				K	SATUAN	Rp	K	SATUAN	Rp	K	SAT	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10.000	orang	53.032.500	1.800	orang	0	1.800	orang	0		0,00	1.800	0	1.800	-	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Capaian Warga Yang Mendapatkan Layanan Pascabencana	100	%	68.496.000	0	%	-	0	%	-		0,00	0	-	0	-	
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	dokumen	23.026.000	0	dokumen	0	0	dokumen	0		0,00	0	0	0	-	
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4	kegiatan	45.470.000	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0		0,00	0	0	0	-	

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sampai dengan triwulan I yaitu sebesar Rp. 950.938.128,- atau 16,60 % dari total Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.729.362.042-, hal ini disebabkan:

- Merupakan upaya konsistensi sehingga anggaran yang dialokasikan diserap berdasarkan kebutuhan riil kegiatan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan ;
- Tertundanya sebagian kegiatan karena belum terpetakannya jadwal kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

Sehubungan dengan hal diatas, maka perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga target kinerja tercapai yaitu :

1. Mengatur ulang jadwal kegiatan dan belanja yang tertunda
2. Mengalokasikan kembali anggaran yang terdampak Refocusing Anggaran pada Perubahan APBD (PAK) Tahun 2025
3. Mengoptimalkan anggaran dan SDM yang ada dalam rangka pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Melaksanakan evaluasi pada masing-masing aktivitas kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.
5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar tercapai target kinerja.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sampai dengan Triwulan I dapat diketahui perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulanagn Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

A. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

B. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan I, hampir semua sub kegiatan mengalami penyesuaian. Hal ini terjadi untuk mengakomodir kebutuhan, terutama aktivitas prioritas yang harus diutamakan.

Adapun rincian perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan, target dan pagu pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

**Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu
Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2025		KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2025		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			5.729.362.042				5.729.362.042		5.357.050.897	- 372.311.145
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KENAIKAN NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	5%	4.146.899.042			5%	4.146.899.042	0,5%	4.256.299.175	109.400.133
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun dan Berkualitas	100%	24.633.000	100%	7.420.000	- 17.213.000
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	22.890.000	6 dokumen	7.420.000	- 15.470.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1.743.000	-	0	- 1.743.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2025		KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2025		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD yang Dilaporkan Tepat Waktu	1 dokumen	2.841.049.458	1 dokumen	2.524.427.273	- 316.622.185
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	2.827.365.458	16 orang	2.516.782.273	- 310.583.185
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	13.684.000	1 dokumen	7.645.000	- 6.039.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	388.712.320	100%	363.154.110	- 25.558.210
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	68.215.100	8 paket	71.778.500	3.563.400
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	2.600.000	4 paket	1.300.000	- 1.300.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	317.897.220	12 laporan	290.075.610	- 27.821.610
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	12 laporan	541.282.264	12 laporan	1.051.115.792	509.833.528
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.890.000	-	0	- 1.890.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2025		KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2025		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	161.000.000	12 laporan	118.891.000	- 42.109.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	378.392.264	12 laporan	932.224.792	553.832.528
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	72 unit	351.222.000	72 unit	310.182.000	- 41.040.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 unit	321.722.000	42 unit	281.982.000	- 39.740.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	29.500.000	30 unit	28.200.000	- 1.300.000
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100%	1.582.463.000			100%	1.582.463.000	-	-	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2025		KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2025		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%	1.100.751.722			-	-	100%	1.100.751.722	- 481.711.278
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%				-	-	100%		
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%				-	-	100%		
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	84.531.500	-	-	-
						Persentase Capaian Warga di suatu wilayah Yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	-	100%	56.965.750	- 27.565.750

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2025		KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2025		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	45000 orang	84.531.500	260 orang	56.965.750	- 27.565.750
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Capaian Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	676.403.000	-	-	-
						Persentase Capaian Warga di suatu wilayah yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	100%	666.301.500	- 10.101.500
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	121.403.000	1 dokumen	111.301.500	- 10.101.500

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2025		KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2025		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 kawasan	555.000.000	1 kawasan	555.000.000	-
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Capaian Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi	100%	753.032.500	-	-	-
						Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	-	-	100%	254.236.472	- 498.796.028
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50.000 orang	700.000.000	50.000 orang	218.767.640	- 481.232.360
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10.000 orang	53.032.500	10.000 orang	35.468.832	- 17.563.668

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BPBD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2025		KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2025		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Capaian Warga Yang Mendapatkan Layanan Pascabencana	100%	68.496.000	-	-	-
						Persentase fasilitasi pemulihan akibat dampak bencana	-	-	100%	123.248.000	54.752.000
					Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	23.026.000	1 dokumen	9.013.000	- 14.013.000
					Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 kegiatan	45.470.000	4 kegiatan	114.235.000	68.765.000

Sumber Data : Rencana Kerja BPBD Kabupaten Probolinggo tahun 2025

BAB IV

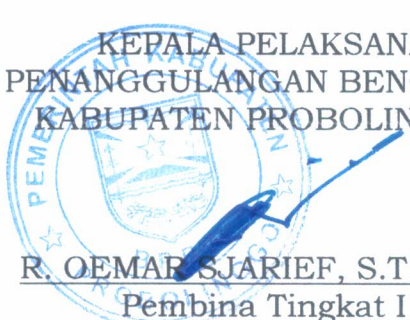
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disusun untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 semester I menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut.

Perubahan Renja ini merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu kualitas kinerja sehingga target dapat tercapai secara optimal. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo untuk tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Probolinggo, Juli 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO


R. OEMAR SJARIEF, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730729 200312 1 003